

ABSTRAK

Sejak pasca perang dunia kedua Jepang menjalin hubungan dengan Myanmar diawali dengan perjanjian reparasi perang pada tahun 1954. Hubungan kedua negara tersebut terus berkembang dan bertransformasi menjadi kerjasama melalui mekanisme *Official Development Assistance* (ODA). Sebagai salah satu donor terbesar, Jepang menyalurkan berbagai bentuk bantuan kepada Myanmar khususnya pada periode 2012–2020, termasuk pembayaran kembali sebagian utang luar negeri Myanmar serta proyek pembangunan lainnya melalui tiga skema ODA: pinjaman lunak (*loan aid*), hibah (*grant aid*), dan kerja sama teknis (*technical cooperations*). Namun, kudeta militer tahun 2021 di Myanmar menyebabkan perubahan drastis dalam dinamika politik Myanmar dan menempatkan Jepang pada posisi dilematis sehingga perlu meninjau ulang keberlanjutan bantuannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan studi pustaka. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perubahan kebijakan ODA dan kepentingan Jepang memberikan bantuan ODA ke Myanmar pasca kudeta militer tahun 2021. Menggunakan teori aktor rasional Graham T. Allison. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan Jepang mempertimbangkan dua kepentingan nasional, yaitu kepentingan diplomatik untuk menjaga hubungan dan stabilitas kawasan melalui komunikasi dan dukungan terhadap mekanisme ASEAN, kepentingan ekonomi untuk melindungi investasi yang telah tertanam di Myanmar. Dengan demikian, keputusan Jepang untuk tetap melanjutkan ODA secara selektif melalui hibah dan kerja sama teknis merupakan keputusan rasional yang paling optimum dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian berdasarkan kepentingan nasionalnya.

Kata Kunci: Jepang, Myanmar, *Official Development Assistance*, Kudeta Militer 2021.

ABSTRACT

Since the end of World War II, Japan has established relations with Myanmar, beginning with a war reparations agreement in 1954. Relations between the two countries continued to develop and transformed into cooperation through the Official Development Assistance (ODA) mechanism. As one of the largest donors, Japan has provided various forms of assistance to Myanmar, particularly during the period 2012–2020, including the repayment of part of Myanmar's foreign debt and other development projects through three ODA schemes: loan aid, grant aid, and technical cooperations. However, the 2021 military coup in Myanmar caused drastic changes in Myanmar's political dynamics and placed Japan in a dilemma, requiring it to review the sustainability of its assistance. This study uses qualitative descriptive methods and literature review. The purpose of this study is to analyze changes in ODA policy and Japan's interests in providing ODA assistance to Myanmar after the 2021 military coup. Using Graham T. Allison's rational actor theory. The results of the study indicate that Japan's decision considered three national interests, such as diplomatic interests to maintain regional relations and stability through communication and support for ASEAN mechanisms, economic interests to protect investments already made in Myanmar. Therefore, Japan's decision to continue ODA selectively through grants and technical cooperation is the most optimal rational decision, considering the advantages and disadvantages based on its national interests.

Keywords: *Japan, Myanmar, Official Development Assistance, 2021 Military Coup.*